

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana desa bagi pembangunan desa di Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 dipengaruhi oleh adanya Ketaatan regulasi Pengelolaan Dana Desa berupa adanya Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa berupa Pengetahuan dalam mengelola dana desa dan keahlian teknis dalam mengelola Dana Desa. Adapun perincian kesimpulannya sebagai berikut :

6.1.1 Ketatatan Regulasi Pengelolaan Dana Desa

Ketaatan Regulasi Pengelolaan Dana Desa adalah Kepatuhan Aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dari berupa Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut :

A. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Proses Perencanaan Pembangunan di Desa Ramedue sudah berjalan dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan, Pasal 20 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dimana dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah melewati 3 proses perencanaan pembangunan yaitu adanya RPJMDes (Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 tahun), RKPDes (Rencana Pembangunan Tahunan Desa, merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 tahun) dan APBDDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, merupakan Rencana tahunan Keuangan Desa) serta dalam proses perencanaan pembangunan sudah Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Ramedue.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Proses Tahap Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Ramedue sudah berjalan baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa di Desa Ramedue sudah dilaksanakan melalui rekening kas desa yang dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah seperti faktur, kwitansi, dan foto barang.

C. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Proses Tahap Penatausahaan pengelolaan Dana Desa di Desa Ramedue sudah berjalan baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 dan 36 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana semua Penatausahaan Keuangan Desa Ramedue dilakukan oleh Bendahara Desa Ramedue yang tercatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Desa lewat Bank NTT Cabang Raijua.

D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di desa dilaporkan serta kepada Pemerintah dalam Hal ini Bupati Sabu melalui Camat Hawu Mehara dan Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ramedue terkait laporan realisasi pelaksanaan atau penggunaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama (Tahap I) dan laporan semester akhir tahun (Tahap II) sebagaimana diamanatkan menurut Pasal 37 dan Pasal 40 Permendagri Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat di Desa Ramedue biasanya disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya sedangkan secara tidak langsung laporan pertanggungjawaban disebarluaskan melalui papan Informasi Desa dan baliho

6.1.2 Kompetensi Aparat Desa

Kompetensi Aparat Desa adalah Kemampuan dan Keahlian Teknis yang dimiliki oleh Aparatur Desa Ramedue Dalam pengelolaan Dana Desa. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut :

A. Pengetahuan Dalam Mengelolah Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa factor pengetahuan aparat Desa Ramedue yang rata-rata berpendidikan S-1 merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan dana desa dimana semua aparat sudah memahami proses pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan sampai pelaporan atau pertanggungjawaban serta adanya kerja sama dari semua elemen yang ada di Desa Ramedue mulai dari Perangkat Desa sampai masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

B. Keahlian teknis dan kemampuan mengelolah dana desa

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Salah satu kunci pengelolaan dana desa di Desa Ramedue tidak terlepas dari Keahlian Teknis dari Perangkat Desa berkat adanya kegiatan bimbingan teknis serta pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Sabu Raijua, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi NTT dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan provinsi NTT Sehingga dampak nyatanya aparat desa ramedue semakin dimudahkan dalam menginput data laporan dan pertanggungjawaban menyangkut Dana Desa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran yaitu :

1. Harapan kedepannya Kepada Pemerintah Desa Ramedue agar menyiapkan papan Informasi Desa dan baliho yang memuat laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa
2. Kedepannya Kepada Pemerintahan Desa Ramedue perlu adanya penambahan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Hawu Mehara dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sabu Raijua
3. Kedepannya tetap mempertahankan Pengelolaan Keuangan Desa yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengedepankan Asas Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif dan disiplin anggaran

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah(2015). Petunjuk pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Hadari, Namawi. 1987. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada.

Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press

Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Grafindo Persada

Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Maryadi, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: BP-FKIP UMS

Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Prasetyo, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2016. *Pengelolaan Keuangan*. Jakarta: BPKP.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sukarna. 2011. *Dasar Dasar Manajemen*, Bandung: CV. Mandar Maju

Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

B. SKRIPSI TESIS DISERTASI

Agus Harto Wibowo (2009) Analisis perencanaan partisipatif (Studi kasus di kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang) program studi magister ilmu administrasi universitas di ponegoro semarang.

Ade Setiawan (2019). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta

Azmi Nurhakiki (2016). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten*

- Pesawaran). Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Ernawati (2018). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Angkasa Pura I (Persero). Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Eva Widiastutiningrum (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Ibnu Prayogi (2018). Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul D.I Yogyakarta. Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta
- M. Indra Maulana (2018). Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Martiana Dwi Rahayu (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Miftahuddin (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)". Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Muh. Iqbal (2016). Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng). Program Studi Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Salman Alfarezi (2017). Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU NO. 6 Tentang Desa (Study Di Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab, Tanggamus Tahun 2016). Program Studi : Hukum Tata Negara. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Siska Winanda (2019). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa Kabupaten Kulon Progo). Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Ulima Islami (2016). Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Zulfa Khaeria Jufri (2018). Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah Gowa. Jurusan ilmu administrasi Negara, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

C. JURNAL

- Agung Mahayu (2018) perencanaan pembangunan partisipasi dalam penerapan E-Musrebang jurnal manajemen pembangunan volume 2 institut pemerintahan dalam negeri jatnagor.
- Abdul Hamid (2016). Kinerja Sekretaris Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Studi Di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur. JISPAR. Volume 5, Issue 2. 2016. ISSN 2089-6123. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Palangkaraya.
- Dwi Wulansari (2017). Tingkat Pemahaman Istilah Asing Dalam Pelajaran Boga Dasar Siswa Kelas X SMKN 2 Godean. Jurnal Pendidikan Teknik Boga Tahun. Universitas Negeri Yogyakarta
- Martien Herna Susanti (2017). Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Jurnal Integralistik No.1/Th.Xxviii/2017, Januari-Juni 2017. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Tuti Ratnasari (2015). Kontribusi Penempatan, Keterampilan Dan Pemberdayaan Pegawai Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Utara. Jurnal Magister Manajemen, Vol.01, No.1, Januari 2015. Institut Pertanian Bogor.

D. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

- Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
- PMK 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Dasar 1945

E. DOKUMEN

- APBDes Desa Ramedue tahun 2017
- Kantor Desa Ramedue Tahun 2017 Tentang perincian belanja /pembiayaan tahun anggaran 2017 Di Desa Ramedue Kecamatan Hawu Mehara kabupaten Sabu Raijua
- Kantor Desa Ramedue Tahun 2017 Tentang perbandingan pendapatan dan pengeluaran dari semua bidang
- Kantor Desa Ramedue Tahun 2021 Tentang Nama-Nama Kepala Desa Yang Pernah Memimpin Desa Ramedue
- Permendagri No113 Tahun 2014 tentang Indikator perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014
- Permendagri No113 Tahun 2014 tentang Indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014
- Permendagri No113 Tahun 2014 tentang Indikator penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014

Permendagri No113 Tahun 2014 tentang Indikator pelaporan pengelolaan keuangan desa
berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014

Permendagri No113 Tahun 2014 tentang Indikator pelaporan pengelolaan keuangan desa
berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014

Profil desa Ramedue 2019 tentang Jumlah Penduduk Desa Ramedue Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2019

Profil desa Ramedue 2019 tentang Jumlah Penduduk Desa Ramedue Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Tahun 2019